

PENGARUH KESIAPAN MASYARAKAT TERHADAP TINGKAT AKTIVASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KOTA SIBOLGA

Jeniusman Ahmad Hutagalung¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah
jeniusman.htg84@gmail.com

Nur'ainun Hasibuan²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah
nurainunhsb.sibolga@gmail.com

Hendra Saputra³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah
sibolga28874@gmail.com

Alfansuri Tanjung⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah
alfansuritanjung85@gmail.com

Nova Zulfani Panggabean⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah
novazulfani@gmail.com

Hadijah Sipahutar⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al Washliyah
hadijahsipahutar@gmail.com

Abstrak

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu program inovatif yang digagas Kementerian Dalam Negeri dalam rangka digitalisasi layanan administrasi kependudukan. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengakses identitas kependudukan secara digital, menggantikan atau melengkapi penggunaan dokumen fisik seperti Kartu Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan aplikasi berbasis teknologi. IKD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, memberikan kemudahan bagi masyarakat, serta mewujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi. Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Administrasi Kependudukan Kota Sibolga bulan November 2024, tercatat hingga bulan November, sebanyak 70.404 penduduk Kota Sibolga telah melakukan perekaman KTP-el dan sebanyak 4.777 jiwa atau 6,78% telah melakukan aktivasi IKD. Angka ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 25% yang kemudian ditingkatkan lagi menjadi 30% atau 21.121 jiwa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus tunggal agar dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang kesiapan masyarakat Kota Sibolga dalam melakukan aktivasi IKD dan juga dapat memberikan informasi yang rinci dan kontekstual tentang fenomena yang diteliti. Meskipun begitu, aplikasi IKD tidak serta merta diterima oleh banyak masyarakat.

Kata Kunci

Kesiapan Masyarakat, IKD

PENDAHULUAN

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan salah satu program inovatif yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mendigitalisasi pelayanan administrasi kependudukan. Program ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses identitas kependudukan secara digital, menggantikan atau melengkapi penggunaan dokumen fisik seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dengan aplikasi berbasis teknologi. IKD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, memberikan kemudahan bagi masyarakat, serta menciptakan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi.

Transformasi digital ini menjadi langkah penting dalam upaya mewujudkan visi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. A adanya proyek perubahan yang ingin diwujudkan yaitu integrasi Satu Data Kependudukan dalam mewujudkan Satu Data Indonesia. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemutakhiran data kependudukan sering menjadi isu utama dikarenakan dinamisnya perubahan data kependudukan tidak diiringi dengan kecepatan pembaruan data di Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini mengakibatkan kurang akuratnya data penduduk di K/L sehingga berdampak pada tidak tercapainya tujuan dan sasaran program K/L yang ditujukan kepada penduduk. Integrasi data yang saat ini telah dilakukan oleh K/L dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjen. Dukcapil Kemendagri) masih bersifat ad-hoc sesuai kebutuhan setiap program dari K/L dan belum dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan satu data kependudukan nasional yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dengan sistem yang terintegrasi, IKD memberikan manfaat yang luas, termasuk penghematan biaya produksi dokumen fisik, peningkatan kecepatan pelayanan, serta penguatan keamanan data kependudukan. Selain itu, implementasi IKD juga mendukung berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemilu, yang membutuhkan data kependudukan akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Pelaksanaan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga merupakan bagian dari upaya daerah dalam menyelaraskan kebijakan nasional. Kota Sibolga sebagai salah satu daerah di Sumatera Utara memiliki tantangan tersendiri dalam implementasi program ini. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain ketersediaan infrastruktur teknologi yang belum merata, tingkat literasi digital masyarakat yang beragam, serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat IKD. Di sisi lain, resistensi perubahan di tingkat masyarakat, terutama pada kelompok yang terbiasa menggunakan metode konvensional, menjadi tantangan yang memerlukan perhatian serius. Berbagai persoalan ini memberikan dampak kurangnya kesiapan masyarakat untuk melakukan aktivasi IKD.

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Sibolga Bulan November 2024, tercatat bahwa sampai dengan bulan November sebanyak 70.404 penduduk Kota Sibolga sudah melakukan perekaman KTP-Elektronik dan sebanyak 4.777 orang atau sebesar 6,78% sudah melakukan aktivasi IKD. Angka ini masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan target nasional 25% yang kemudian dinaikkan lagi menjadi sebesar 30% atau sebanyak 21.121 orang. Data tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini.

Rendahnya capaian aktivasi IKD di Kota Sibolga sama dengan fenomena yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur sebagaimana yang dimuat dalam penelitian terdahulu yang berjudul Digitalisasi Pelayanan Publik Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Bojonegoro oleh Siti Marfu'ah dkk yang menyatakan bahwa perbandingan antara target dan realisasi sangat jauh karena targetnya 25% namun terealisasi hanya 8%, artinya tingkat partisipasi masyarakat masih rendah, perlu adanya sosialisasi dari pemerintah dan dukungan masyarakat dalam digitalisasi. Selain itu, ada juga penelitian Defi Tiara Amanda yang berjudul Pengaruh Tingkat Kesiapan Masyarakat Terhadap Penerapan Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 yang menyatakan bahwa tingkat kesiapan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital di Desa Dinoyo.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sekaligus mengevaluasi pelaksanaan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. Penelitian ini akan membahas secara komprehensif mengenai “Pengaruh Kesiapan Masyarakat Terhadap Tingkat Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.”

LANDASAN TEORI

Tingkat Kesiapan Masyarakat

Menurut **Soselisa (2013)**, indikator yang digunakan dalam mengukur karakteristik masyarakat meliputi umur, tingkat pendidikan, pendapatan, jumlah tanggungan dan tingkat partisipasi.

Pengukuran kesiapan masyarakat menggunakan enam dimensi untuk mengidentifikasi tingkat kesiapan masyarakat terhadap suatu isu. Dimensi kesiapan merupakan faktor kunci yang mampu mempengaruhi kesiapan masyarakat untuk mengatasi suatu isu. Terkait dimensi yang digunakan menurut **Plested (2006)**, sebagai berikut :

- a. Upaya Masyarakat (*Community Efforts*)
Menurut KBBI, upaya dapat diartikan usaha untuk mencapai suatu tujuan atau memecahkan persoalan. Menurut **Pramudyani (2019)**, upaya dalam memberdayakan masyarakat dapat meliputi kegiatan penyuluhan (ceramah, diskusi, praktek) dan program yang menjadi tujuan dilakukan upaya
- b. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Upaya (*Community Knowledge of the Efforts*)
mendefinisikan pengetahuan terkait upaya masyarakat dengan mengetahui apakah masyarakat sudah mengetahui secara umum terkait upaya yang ada. Pengetahuan masyarakat dapat diukur dengan mengukur tingkat kekhawatiran masyarakat dari skala tidak khawatir hingga sangat khawatir. Plested juga mengukur terkait kelemahan serta kekuatan dari upaya yang ada di masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan telah berhasil atau tidak sehingga, didapatkan informasi terkait upaya masyarakat terhadap isu yang berkembang.
- c. Peran Pemimpin (*Leadership*)
- d. Iklim Masyarakat (*Community Climate*)
Iklim komunitas memiliki arti bagaimana sikap masyarakat terhadap isu. Iklim terhadap komunitas yang dimaksud dapat berupa tingkat kekhawatiran masyarakat.
- e. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Isu (*Community Knowledge about the Issue*)
Pengetahuan masyarakat terhadap isu adalah bagaimana masyarakat mengetahui penyebab, konsekuensi serta dampak yang timbul terhadap pembangunan ke masyarakat. Dalam hal ini menilai tingkat pengetahuan dan seberapa jauh masyarakat mengetahui terkait isu yang ada.
- f. Sumber Daya yang Berkaitan dengan Isu (*Resources Related to the Issue*)
Kurniati (2015) yang mendefinisikan sumber daya sebagai sikap masyarakat terhadap isu dan tingkat dukungan Masyarakat

IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)

Pemerintah telah menerapkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada tahun 2022 sesuai dasar hukum pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022** tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Identitas Kependudukan Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah versi digital dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tersimpan dalam sebuah aplikasi di *smartphone*. IKD berfungsi sebagai bukti identitas elektronik yang memudahkan akses data kependudukan secara kapan saja dan di mana saja, mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, serta membantu mencegah pemalsuan identitas.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna disejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, dan masalah sosial (Cresswell, 2016). Penelitian jenis ini bertujuan untuk mengamati kejadian dan peristiwa yang terjadi untuk menjelaskan dan menganalisa berbagai data dan informasi yang didapatkan tanpa menggunakan alat dan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan metode *single case study* untuk memberikan gambaran mendalam mengenai kesiapan masyarakat Kota Sibolga untuk melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) selain itu juga dapat memberikan informasi mendalam yang rinci dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan di lokasi penelitian yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga.

Kriteria informan utama dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Penduduk Kota Sibolga yang sudah melakukan aktivasi IKD.
- 2) Berusia antara 17- 40 tahun.
- 3) Memiliki berbagai tingkat pendidikan dan pekerjaan untuk memastikan keberagaman perspektif.

Kriteria informan pendukung meliputi:

- 1) Petugas Pelayanan dan Lapangan pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Dukcapil.
- 2) Pegawai Dinas Dukcapil pada yang bertanggung jawab dalam sosialisasi penggunaan aplikasi IKD.
- 3) Pegawai dan Petugas berusia 20-50 tahun.

Penelitian menggunakan data primer yang berasal dari sumber yang asli dan dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini. Selain itu juga menggunakan data sekunder yaitu studi yang dilakukan oleh pihak lain untuk sasaran mereka sendiri (Cooper & Emory, 1996:256). Data primer diperoleh dari wawancara terkait aplikasi dan aktivasi IKD kepada Pegawai, Petugas dan Penduduk Kota Sibolga yang datang ke Dinas Dukcapil Kota Sibolga. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono, *Purposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (2017:85). Artinya sampel penelitian adalah orang yang benar-benar memahami aplikasi IKD dan penduduk Kota Sibolga yang akan dan telah melakukan aktivasi IKD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang diketahui oleh Informan Utama agar dapat melihat bagaimana kesiapan mereka dalam menggunakan aplikasi IKD.

Untuk membuat data lebih mudah dipahami, penelitian ini menggunakan Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman. Menurut model ini, proses analisis data terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan triangulasi, peneliti mengumpulkan informasi sekaligus menguji keandalan data, yang berartimengevaluasi keandalan data melalui penggunaan berbagai teknik pengumpulan informasi dari berbagai sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Informasi tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Kota Sibolga adalah salah satu kota yang berada di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini terletak di pantai barat pulau Sumatera, membujur sepanjang pantai dari Utara ke Selatan dan berada pada kawasan Teluk Tapian Nauli. Kota Sibolga hanya memiliki luas 10,77 km². Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Sibolga pada pertengahan tahun 2024, penduduk Sibolga sebanyak 99.747 jiwa dan berdasarkan data Dinas Dukcapil sampai dengan bulan November 2024, jumlah penduduk Kota Sibolga sebanyak 99.747 orang. Akan tetapi dari 70.404 penduduk Kota Sibolga sudah melakukan perekaman KTP-Elektronik hanya sebanyak 4.777 orang atau sebesar 6,78% yang sudah melakukan aktivasi IKD sebagaimana data pada tabel di bawah ini :

Tabel 1. Persentase Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga November 2024

No	Kecamatan / Kelurahan	Total Perekaman Semester I 2024	Telah Aktivasi s.d Nov 2024	Belum Teraktivasi s.d Nov 2024	Total Registrasi IKD	Persentase (%)
1	SIBOLGA UTARA	16643	1222	11	1233	7.41
	Hutabangunan	1766	119	1	120	6.8
	Angin Nauli	3104	270	2	272	8.76
	Huta Tonga-Tonga	2269	188	2	190	8.37
	Sibolga Ilir	5167	336	4	340	6.58
	Simare-Mare	4337	309	2	311	7.17
2	SIBOLGA KOTA	12235	751	6	757	6.19
	Kota Baringin	1847	165	0	165	8.93
	Pasar Baru	1425	69	0	69	4.84
	Pasar Belakang	4619	272	3	275	5.95
	Pancuran Gerobak	4344	245	3	248	5.71
3	SIBOLGA SELATAN	25444	1752	25	1777	6.98
	Aek Habil	5236	346	5	351	6.7
	Aek Manis	7793	507	6	513	6.58
	Aek Muara Pinang	4256	258	3	261	6.13
	Aek Parombunan	8159	641	11	652	7.99
4	SIBOLGA SAMBAS	16082	1052	14	1066	6.63
	Pancuran Kerambil	2378	184	3	187	7.86
	Pancuran Dewa	3929	279	3	282	7.18
	Pancuran Pinang	3789	234	3	237	6.25
	Pancuran Bambu	5986	355	5	360	6.01
	JUMLAH	70404	4777	56	4833	6.86

Sumber : Dinas Dukcapil Kota Sibolga, 2024

Berdasarkan wawancara dengan informan yang datang ke Dinas Dukcapil, mereka belum mendapatkan informasi yang cukup mengenai IKD, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat meskipun Dinas Dukcapil sudah menyampaikan informasi terkait IKD kepada Kepala Lingkungan se Kota Siboga, akan tetapi informasi tidak diteruskan kepada masyarakat.

Merujuk RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026 pada perbandingan di tingkat Provinsi Sumatera Utara di Tahun 2020, Kota Sibolga memiliki peringkat Indeks Pembangunan Manusia ke -9 dengan nilai sebesar 73,63. Salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah masih rendahnya tingkat literasi penduduk kota sibolga. Informan menyampaikan bahwa mereka malas membaca dan meng-*update* informasi peraturan dan perundangan-undangan yang terbaru karena merasa tidak memerlukan informasi tersebut. Informan sudah merasa cukup dengan Dokumen Kependudukan yang dicetak oleh Dinas Dukcapil sehingga tidak merasa perlu melakukan aktivasi IKD.

Faktor penghambat lain dalam pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan digital, masih adanya masyarakat yang belum memiliki *handphone*, masyarakat malas menyimpan aplikasi identitas kependudukan digital serta belum adanya kepentingan yang mendesak dalam penggunaan identitas digital.

Adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital menuntut Dinas Dukcapil Kota Sibolga untuk dapat mencari solusi. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pada pelayanan dapat mencakup serangkaian langkah atau tindakan yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mengurangi, atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat proses pelayanan. Adapun upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang ditemukan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital yaitu dengan terus melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyebaran informasi juga dapat melalui media sosial atau disampaikan secara langsung agar masyarakat dapat mengetahui informasi tersebut. Selain itu, juga dilakukan peningkatan terhadap kualitas jaringan internet di Dukcapil Kota Sibolga. Karena kualitas jaringan internet sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital dan untuk itu wajib ditingkatkan demi keberhasilan pelaksanaan aktivasi identitas kependudukan digital di Kota Sibolga. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga juga melakukan kerja sama dengan pihak OPD se Kota Sibolga, Masyarakat di Kelurahan dan Perguruan Tinggi dengan program jemput bola aktivasi identitas kependudukan digital.

Kerjasama pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital

Upaya untuk mewujudkan layanan yg cepat, akurat, lengkap dan gratis, maka inovasi perlu terus dilakukan. Diperlukan sistem digital terpercaya berupa Identitas Digital Kependudukan yg berasal dari penyelenggara layanan adminduk yaitu Ditjen Dukcapil, Kemendagri.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 dalam penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital pada pasal 14 yaitu mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi mengenai digitalisasi kependudukan sekaligus pemanfaatan digitalisasi kependudukan maka Dinas Dukcapil Kota Sibolga melakukan upaya kerjasama dengan Pihak Swasta dan BUMN, salah satunya adalah sektor perbankan. Dinas Dukcapil Kota Sibolga menyampaikan informasi terkait aplikasi ini kepada beberapa Bank di Kota Sibolga dengan harapan masyarakat dapat memanfaatkan IKD ini untuk urusan administrasi perbankan mereka. Akan tetapi, tanggapan pihak perbankan masih mengecewakan. Sulitnya dan panjangnya alur regulasi yang harus ditempuh untuk mendapatkan persetujuan dari Direksi di Pusat menjadi kendala yang tidak bisa diselesaikan sampai dengan saat ini. Bank memiliki prosedur tersendiri mengenai persyaratan dokumen kependudukan yang harus disiapkan oleh nasabah, belum bisa menggunakan Identitas Kependudukan Digital. Hal ini membuat masyarakat merasa tidak perlu melakukan aktivasi IKD pada *handphone* mereka karena tidak bisa digunakan.

Selain sektor perbankan yang belum bisa memanfaatkan IKD ini, untuk sektor lain juga tidak dapat dimanfaatkan. Misalnya untuk urusan mengambil bantuan sosial ke Kantor Pos, maka masyarakat harus membawa Kartu Keluarga Asli.

Aplikasi IKD belum sempurna dan sering error

Pemerintah akan mengganti e-KTP dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD) alias KTP digital yang bisa diakses melalui smartphone. Masyarakat dapat melakukan aktivasi melalui aplikasi IKD. Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Adapun fungsi IKD antara lain sebagai pembuktian identitas, autentifikasi identitas, dan otorisasi identitas.

Meski begitu aplikasi IKD nyatanya tidak serta merta cepat diterima oleh banyak masyarakat. Bahkan aplikasi IKD justru banjir kritik dari berbagai pihak. Secara keseluruhan aplikasi IKD masih sering mengalami *error* hingga berkali-kali gagal akses. Hal ini diungkapkan oleh masyarakat dan petugas baik yang di pelayanan maupun petugas di lapangan yang sudah mencoba menggunakan aplikasi IKD.

Salah satu kasus yang ditemui oleh petugas adalah pada saat Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 lalu. Ketika peraturan sudah memperbolehkan IKD dapat digunakan sebagai dokumen kependudukan untuk pemilih, akan tetapi aplikasinya tidak dapat diinstal pada *handphone* yang terbaru. Ada pemberitahuan yang menyebutkan bahwa aplikasi IKD ini dirancang untuk Android dengan versi lebih lama. Hal ini tentu saja mengecewakan masyarakat khususnya penduduk Kota Sibolga yang sudah antusias ingin melakukan aktivasi IKD agar bisa memanfaatkannya pada pilkada serentak beberapa bulan yang lalu.

Aplikasi IKD dinilai sarat dengan kebocoran data. Pasalnya kebijakan privasi IKD memberikan kesan bahwa pemerintah akan lepas tangan jika terjadi kebocoran data penduduk. Dalam keadaan apapun instansi tidak akan bertanggung jawab atas kerugian khusus, insidental, tidak langsung, atau konsekuensi apapun (termasuk, namun tidak terbatas pada, kerugian atas hilangnya keuntungan, hilangnya data, atau informasi lain). Poin tersebut membuat masyarakat takut karena pemerintah seperti lepas tangan jika terjadi kebocoran data penduduk.

KESIMPULAN

Kesiapan masyarakat dalam melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) perlu didukung oleh sosialisasi yang berkelanjutan agar masyarakat memahami manfaat IKD. Saat ini, aplikasi IKD masih dalam tahap pengembangan menuju percepatan transformasi digital dan keterpaduan Layanan Digital Nasional yang inklusif serta melibatkan kementerian/lembaga, BUMN, dan pihak swasta.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga terus berupaya mengatasi berbagai hambatan aktivasi IKD agar target nasional dapat tercapai. Petugas ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) pada Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data telah berupaya maksimal mendorong partisipasi masyarakat meskipun dengan keterbatasan sarana. Ke depan, Dukcapil Kota Sibolga berkomitmen memperluas pemanfaatan IKD lintas sektor guna meningkatkan tingkat aktivasi hingga menjangkau seluruh wajib KTP di Kota Sibolga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga telah memberikan ijin untuk meneliti dan terimakasih juga kepada Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Al Washliyah Sibolga yang telah mendukung penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Cooper, D. R., & Emory, C. W. (1996). *Metode penelitian bisnis* (Jilid 1, Edisi ke-5). Erlangga.

- Creswell, J. W. (2016). *Metode penelitian: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
<https://repositoryfisip.unla.ac.id/browse/previews/3510>
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga. (2024). *Laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan Kota Sibolga bulan November 2024*. Pemerintah Kota Sibolga.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital*.
<https://peraturan.bpk.go.id>
- Marfu'ah, S. (2024). Digitalisasi pelayanan publik: Ketidaksiapan masyarakat dalam penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Bojonegoro. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 1–15.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/12309>
- Pemerintah Kota Sibolga. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021–2026*.
<https://sibolgakota.go.id/home/wp-content/uploads/2022/09/RPJMD-LAMPIRAN-BAB-II.pdf>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tiara Amanda, D. (2024). Pengaruh tingkat kesiapan masyarakat terhadap penerapan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Desa Dinoyo Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto tahun 2024. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(3), 1–12.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4405820>